

ABSTRAK

Muhammad Romli, 21382071037, *Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli dan Abu A'la Al-Maududi tentang Politik Kekuasaan dalam Konteks Sistem Politik dan Regulasi Kekuasaan di Indonesia*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ach. Faidi, LL.M, MA.

Kata Kunci: Komparatif, Politik kekuasaan, Sistem Politik, Regulasi Kekuasaan.

Perdebatan tentang kekuasaan, moralitas, dan legitimasi politik menjadi isu utama dalam ilmu politik. Niccolo Machiavelli memisahkan kekuasaan dari etika dan menekankan pragmatisme dalam mempertahankan negara, sementara Abu A'la Al-Maududi melihat kekuasaan sebagai amanah ilahi yang harus tunduk pada syariat Islam. Penelitian ini membandingkan pemikiran keduanya dan menganalisis relevansinya terhadap sistem politik Indonesia, yang mengadopsi demokrasi Pancasila dengan nilai moralitas ketuhanan, namun seringkali dipengaruhi oleh praktik.

Ada tiga rumusan masalah penelitian ini, yaitu; *pertama*, bagaimana konsep pemikiran Nicholo Machiavelli tentang politik kekuasaan? *Kedua*, bagaimana konsep pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang politik kekuasaan? *Ketiga*, bagaimana komparasi dan relevansi pemikiran Nicholo Machiavelli dan Abu A'la Al-Maududi tentang politik kekuasaan terhadap sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber data primer karya dari Machiavelli, seperti: *Il Principe*, *Diskursus*, *The Art of War*, dan karya tulisan dari Abu A'la al-Maududi, seperti: *Hukum dan Konstitusi*, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, *Penjajahan Peradaban*, *Prinsip-Prinsip Islam*, *Sistem Politik Islam Abu A'la al-Maududi*.

Hasil penelitian ini adalah Niccolo Machiavelli memandang politik kekuasaan sebagai alat untuk memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan negara, dengan menekankan pragmatisme dan realisme politik. Ia berargumen bahwa tindakan penguasa seharusnya didasarkan pada realitas politik. Abu A'la Al-Maududi, di sisi lain, melihat kekuasaan sebagai amanah ilahi yang hanya sah jika dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Ia menolak sistem sekuler dan demokrasi liberal, dan mengusung konsep Teo-Demokrasi dan Khilafah, di mana kedaulatan Tuhan mengatur keputusan rakyat yang dibatasi oleh hukum syariat. Pemikiran Machiavelli dan Al-Maududi memberikan perspektif berbeda tentang kekuasaan di Indonesia. Machiavelli mendukung pragmatisme kekuasaan, seperti sentralisasi dan manipulasi hukum, untuk menjaga stabilitas negara. Sebaliknya, Al-Maududi menekankan kekuasaan yang adil dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Demokrasi Pancasila, yang mengedepankan nilai musyawarah dan Ketuhanan, lebih selaras dengan pandangan Al-Maududi, meski praktik politik Indonesia sering mencerminkan realisme Machiavellian.